

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN AGRIBISNIS TUNTUTAN MODERNISASI DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN MASA DEPAN

Rosnita

Staf Pengajar Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau
rosnita_ita@yahoo.co.id

ABSTRACT

Enters Long-range Development of Phase to II (PJP-II) development of agriculture in Indonesia given on to some challenges at. In the other side, agriculture in Indonesia still residing in at concerning condition. Repelita VI as beginning of long-range development of II (PJP II) orientation of development of agriculture experiences basic alteration, from orientation at increasing production, becomes development of agriculture orienting at agribusiness.

With the forming of WTO and existence of agreement like AFTA (2003), APEC (2020), NAPHTHA, MEE, etcetera unavoidably Indonesia must change agriculture face from subsisten or traditional pattern becomes agriculture that is going forward, taft and efficient as presentation of highly competitive modern agriculture. One of presentation of continual reform at institution is the importance of strengthening and re-arranges institution that is a supporting and activator component in dynamic agribusiness system.

By referring to idea of Jansen in Syahyuti, 2003, in doing renewal of institution, there are 3 step which can be done : 1) identification of what alteration happened at the area, 2) studies what modification done by the institution 3) evaluation of effectivity and quality system to comprehend alteration of effect intended.

Kata kunci : *Transformation, Institution, Agribusiness*

PENDAHULUAN

Memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke II (PJP-II) pembangunan pertanian Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan sekaligus, antara lain, persaingan pasar global, pemenuhan kebutuhan pangan, alternatif pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga bahan pangan pokok, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta sebagai penyediaan lapangan kerja.

Disisi lain pertanian Indonesia masih berada pada kondisi yang memprihatinkan. Budaya usaha pertanian Indonesia masih tradisional, kualitas sumber daya manusia pengelola dan pekerja di sektor pertanian masih rendah, sehingga sistem dan usaha agribisnis belum dikelola secara professional, tingkat efisiensi usaha masih rendah, jaringan agribisnis belum terbentuk dan lain sebagainya.

Kinerja kelembagaan agribisnis yang belum sesuai dengan harapan apabila ditelusuri lebih jauh kedalam setiap subsistem agribisnis akan ditemui permasalahan yang membuat kinerja kelembagaan menjadi rendah dalam menunjang pembangunan pertanian. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kelembagaan Sarana Produksi

Penyediaan dan penyaluran sarana produksi (saprodi) seperti bibit, pupuk dan pestisida sangat lemah. Hal ini akibat dari lemahnya manajemen lembaga penyedia dan penyalur saprodi sehingga prinsip enam tepat (jenis, jumlah, waktu, lokasi dan harga, serta mutu) sering tidak tercapai.

2. Kelembagaan Usahatani/ Produksi

Masalah yang menonjol dalam usahatani keluarga sebagai kelembagaan usahatani terkecil antara lain rendahnya tingkat pendidikan petani selaku pelaku agribisnis. Selain tingkat pendidikan, kepemilikan lahan usaha juga relatif kecil, Masalah struktural ini menyulitkan upaya memposisikan petani/kelompok tani sebagai lembaga agribisnis yang tangguh.

3. Kelembagaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Masalah yang dihadapi kelembagaan ini adalah masalah teknologi yang terkait dengan alat dan mesin, permodalan, dan manajemen usaha. Masalah dalam pengolahan hasil adalah ketersediaan bahan baku yang tidak kontinu, kesulitan modal usaha, persaingan bisnis, pengemasan (*packaging*).



4. Kelembagaan Pemasaran

Permasalahan yang dihadapi lembaga ini adalah: efisiensi pemasaran yang rendah karena panjangnya rantai pemasaran dan biaya transportasi yang tinggi, fluktuasi harga yang besar, permodalan usaha, serta keterampilan manajemen di bidang usaha pemasaran. Disamping itu juga mengkoordinasikan permintaan dan penawaran secara efektif masih rendah.

5. Kelembagaan Jasa Layanan Pendukung (Penunjang)

Kelembagaan permodalan masih lemah, dimana banyak kredit-kredit dibidang agribisnis belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong perkembangan agribisnis. Disamping itu kelembagaan Penyuluhan Pertanian kemampuan dalam melakukan alih teknologi kepada kelompok tani masih lemah. Perubahan kelembagaan BPP di masing-masing daerah seperti adanya Balai Informasi Pertanian (BIP) belum sesuai dengan harapan.

PEMBAHASAN

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN AGRIBISNIS

Repelita VI sebagai awal pembangunan jangka panjang II (PJP II) orientasi pembangunan pertanian mengalami perubahan yang mendasar, dari orientasi pada peningkatan produksi, menjadi pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis. Ini dilakukan dalam menjawab tantangan masa depan, yang pada hakikatnya merupakan antisipasi terhadap perubahan dalam negeri dan lingkungan global yang berkembang secara cepat dan dinamis.

Dengan terbentuknya WTO dan adanya kesepakatan Negara-negara kawasan seperti AFTA (2003), APEC (2020), NAFTA, MEE, dan sebagainya mau tidak mau Indonesia akan terlibat pada perdagangan global yang semakin kompetitif. Untuk ikut bermain dalam perdagangan global yang semakin ketat dan kompetitif tersebut, maka Indonesia harus mengubah wajah pertanian dari corak subsisten atau tradisional menjadi pertanian yang maju, efisien dan tangguh sebagai wujud pertanian modern yang berdaya saing tinggi.

Upaya untuk mewujudkan pertanian modern ditengah krisis ekonomi saat ini mengharuskan adanya reformasi dibidang

pertanian, agar mampu menggerakkan kembali roda pembangunan serta memberdayakan perekonomian rakyat di pedesaan. Reformasi berkesinambungan disemua aspek pembangunan, meliputi kebijaksanaan, pelaksanaan dan program dalam berbagai bidang seperti penyediaan dan penyaluran saprodi, dukungan kelembagaan dan permodalan serta pengolahan dan pemasaran hasil. Salah satu wujud reformasi kelembagaan adalah perlunya memperkuat dan menata kembali kelembagaan yang mendukung dan merupakan komponen penggerak dalam sistem agribisnis yang dinamis.

Pembaruan kelembagaan (*institutional innovation*) merupakan suatu upaya untuk memahami apa-apa saja perubahan yang telah dialami suatu kelembagaan dimana sebelumnya telah dilakukan beberapa usaha perbaikan. Ada tiga langkah yang dapat dilakukan untuk memahami pembaharuan kelembagaan yaitu :

- 1) Identifikasi perubahan yang terjadi pada lingkungan, baik berupa kondisi sosial ekonomi ataupun tekanan dari mereka yang menerima jasa pelayanan dari kelembagaan,
- 2) Pelajari modifikasi apa yang dilakukan kelembagaan sebagai respon terhadap perubahan tadi. Apakah mereka meningkatkan kapasitas kelembagaannya dengan meningkatkan manajemen atau menciptakan metode kerja baru, atau bahkan membuat kelembagaan baru, dan
- 3) Evaluasi kualitas dan keefektifan dari sistem sebagai cara untuk memahami efek dari perubahan dimaksud (Janssen dalam Syahyuti, 2003).

Secara konseptual sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi (*input*), sampai dengan pemasaran produk produk yang dihasilkan oleh usahatani serta agroindustri, yang saling terkait satu sama lain.

Rasahan dkk (1999), menyatakan sistem agribisnis merupakan suatu Sistem yang terdiri dari berbagai Subsistem yaitu :

1. Subsistem agribisnis hulu (*Upstream agribusiness*), yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan (Agroindustri hulu) dan perdagangan sarana produksi pertanian primer (seperti industri

- pupuk, obat-obatan, bibit/benih, alat dan mesin pertanian dll)
2. Subsistem usahatani (*on farm agribusiness*) disebut sebagai sector pertanian primer
 3. Subsistem agribisnis hilir (*Down-stream agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, beserta kegiatan perdagangannya di pasar domestic dan internasional
 4. Subsistem jasa layanan pendukung (*Supporting institution*), seperti lembaga keuangan dan pembiayaan, transportasi, penyuluhan, layanan informasi agribisnis, penelitian dan sebagainya

Rangkaian kegiatan yang terkait dalam sistem agribisnis diatas digerakkan oleh berbagai kelembagaan. Peranan kelembagaan dalam sistem agribisnis sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di masa depan. Selain itu pertanian berwawasan agribisnis memerlukan "dukungan rancang bangun kelembagaan" dalam suatu bentuk jaringan kelembagaan agribisnis yang terpadu, sistematis dan berfungsi secara efisien dalam mendukung kegiatan pertanian. Pemberdayaan kelembagaan menuju bangun kelembagaan agribisnis yang tangguh merupakan salah satu strategi dalam pembangunan agribisnis melalui modernisasi.

Mengacu pada pemikiran modernisasi diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa modernisasi pertanian adalah proses pembaharuan (transformasi) agribisnis sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui bahwa agribisnis terdiri dari 4 subsistem yang dapat ditentukan oleh 4 unsur yaitu :

- 1) Pengusaha (petani dan pengusaha agribisnis lainnya),
- 2) Buruh tani dan pekerja agribisnis secara keseluruhannya,
- 3) Perusahaan (usahatani dan perusahaan agribisnis lainnya), dan
- 4) Industri agribisnis (struktur atau jaringan agribisnis) (Pranadji, 2003)

Untuk itu, modernisasi pertanian haruslah ditelusuri dari ada tidaknya pembaharuan pada keempat unsur agribisnis tersebut. Dengan perkataan lain,

modernisasi pertanian mengandung empat syarat keharusan yang saling berhubungan satu sama lain yaitu :

1. Modernisasi perusahaan (petani dan pengusaha agribisnis secara umum)
2. Modernisasi pekerja (buruh tani dan pekerja agribisnis secara umum)
3. Modernisasi perusahaan (usahatani dan perusahaan agribisnis secara umum)
4. Modernisasi struktur agribisnis.

Modernisasi perusahaan (*entrepreneur*) dan pekerja merupakan kunci utama dalam modernisasi pertanian karena mereka inilah motivator, penentu arah dan pengatur dinamika agribisnis. Modernisasi ini paling tidak meliputi pembaharuan dalam 7 atribut sumberdaya manusia, yakni :

- 1) rasionalitas,
- 2) antisipasi,
- 3) empati,
- 4) mobilitas,
- 5) partisipasi, dan
- 6) sikap, serta
- 7) nilai (Dube dan Lerner, dalam Pranadji, 2003).

Pengusaha dan pekerja agribisnis modern dicirikan oleh rasionalitas yang tinggi dengan arti kata senantiasa memahami dan menjelaskan suatu kejadian dan situasi dalam hubungan sebab akibat berdasarkan kaidah ilmiah. Serta senantiasa menyusun strategi tindakan berdasarkan hubungan cara-tujuan secara sistematis dan dengan penuh perhitungan. Jadi modernisasi disini merupakan proses perubahan "cara berpikir" dari berdasarkan kepercayaan duniawi menjadi berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan perubahan "pengambilan keputusan" dari secara acak menjadi secara sistematis.

Antisipasi adalah kemampuan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa mendatang, dan melakukan tindakan penyesuaian yang tepat untuk itu. Dicitrakan oleh sikap yang senantiasa berpikir jangka panjang, mampu mengantisipasi dengan cukup tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan melakukan tindakan penyesuaian yang tepat dengan prakiraan perubahan tersebut.

Empati, adalah kemampuan untuk memahami cara berpikir, sikap dan pola tindak orang lain. Modernisasi berarti peningkatan kemampuan empati, karena

inilah yang menentukan kemampuan untuk menentukan strategi persaingan dan kerjasama bisnis yang tepat, kemampuan memimpin perusahaan dan kemampuan untuk menentukan pengembangan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen.

Mobilitas adalah sikap dan kemampuan untuk meraih status yang lebih baik. Dengan kata lain, pengusaha dan pekerja agribisnis modern bersikap dinamis. Sedangkan pengusaha dan pekerja agribisnis tradisional bersifat statis.

Partisipasi adalah kemampuan untuk meraih segala kesempatan yang ada demi untuk peningkatan status. Dicitrakan oleh tingkat dan partisipasi yang cepat dan tinggi (optimistic).

Sikap dan nilai mengacu pada motivasi dan pandangan hidup seseorang. Dicitrakan oleh motivasi untuk senantiasa berupaya meraih kemajuan atau keberhasilan atau sikap untuk senantiasa bekerja keras. Tidak atas dasar dorongan imbalan jasa material semata.

MODERNISASI DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Modernisasi dan pembangunan harus kita jadikan sebagai pegangan dalam upaya kita "Membangun Pertanian Modern" Pada hakikatnya modernisasi dan pembangunan pertanian memiliki sifat umum yang sama yaitu suatu proses perubahan sektor pertanian dan agribisnis secara lebih luas. Secara mendalam apabila ditelusuri terdapat 4 perbedaan yang akan terlihat dengan jelas yakni :

Pertama, sasaran atau tujuannya. Pembangunan pertanian memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa secara umum dan kesejahteraan petani khususnya, yang harus diukur dengan indikator-indikator absolute. Modernisasi pertanian memiliki sasaran relatif yaitu bagaimana mencapai tingkat kemajuan yang paling mutakhir. Sasaran modernisasi pertanian pada hakekatnya ialah berupaya mencapai kemajuan seperti yang telah dicapai oleh sektor pertanian di Negara-negara maju.

Kedua, dari segi perspektif. Pembangunan pertanian senantiasa didasarkan pada perspektif jangka panjang. Tidak hanya berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat pada masa kini, tetapi juga pada masa mendatang. Sebaliknya modernisasi pertanian praktis didasarkan pada perspektif temporer, yakni bagaimana

mencapai tahapan kemajuan mutakhir (saat ini).

Ketiga, strategi atau upaya-upaya pembangunan biasanya dilakukan dengan meningkatkan efisiensi (produktivitas), perluasan atau peningkatan asset produktif dan peningkatan partisipasi; sedangkan modernisasi pertanian praktis hanya dilakukan dengan pemutakhiran nilai, teknologi dan organisasi. Dengan demikian, dampak dari modernisasi pertanian belum tentu konsisten dengan tujuan pembangunan pertanian.

Keempat, dari segi proses, pembangunan pertanian dilakukan secara terencana dan terkoordinasi melalui keterlibatan pemerintah yang intensif, sedangkan modernisasi pertanian biasanya berlangsung secara diffusif melalui efek demonstrasi dan biasanya tidak terencana dan tidak terkoordinasi. Karena memang dirancang dan dikoordinasi, maka upaya-upaya pembangunan pertanian dapat mencapai tujuannya dengan efektif. Sebaliknya modernisasi pertanian belum tentu memberikan dampak yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pertanian. Perbedaan Modernisasi dan Pembangunan disajikan dalam Tabel dibawah ini

Tabel Perbedaan Karakteristik Modernisasi dan Pembangunan Pertanian

Atribut	Modernisasi Pertanian	Pembangunan Pertanian
1. Sasaran	Kemajuan Relatif	Kemajuan Absolute
2. Perspektif	Populer (masa kini)	Berkelanjutan (jangka panjang)
3. Strategi	Pemutakhiran	Efisiensi, ekspansi, partisipasi
4. Proses	Difusi, dispersal	Terencana dan terkoordinasi

Sumber: Pranadji, 2003

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa modernisasi pertanian belum tentu memberikan dampak yang positif, malah sebaliknya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan pertanian. Sebagai contoh, modernisasi pertanian melalui modernisasi teknologi usahatani yang padat modal dan mahal tentu akan dapat menimbulkan peningkatan pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembangunan pertanian kita. Modernisasi pertanian yang merombak lembaga-lembaga ekonomi tradisional

seperti sistem bagi hasil dapat pula menimbulkan kesenjangan tingkat pendapatan.

Tidak sinkronnya modernisasi dan pembangunan pertanian terutama adalah akibat dari tidak terencananya dan tidak tersinkronisasinya proses modernisasi tersebut. Oleh karena itu jika kita menghendaki modernisasi pertanian itu konsisten dengan pembangunan pertanian maka modernisasi tersebut haruslah *kita rencanakan, kita sinkronisasikan dan kita kendalikan*. Dengan perkataan lain, modernisasi pertanian itu haruslah kita jadikan sebagai bagian dari *strategi pembangunan pertanian*. Berarti, *modernisasi pertanian haruslah kita rencanakan dan kita kelola dengan sebaik-baiknya*. Apabila dibiarkan berlangsung secara bebas, modernisasi pertanian dapat sangat membahayakan pembangunan pertanian.

Kesimpulan Rapat Kerja Pertanian mengenai Pertanian Modern (1995), tentang pertanian modern, adalah pertanian dengan corak menuntut efisiensi yang tinggi, berorientasi pasar dan mampu bersaing di bidang mutu (*quality*), jumlah (*quantity*), kontinuitas (*continuity*), ketepatan waktu (*delivery on time*) dan harga (*price*) baik di pasar dalam negeri (*domestic*) maupun di pasar internasional (*export*). Sistem pertanian modern tersebut merupakan kegiatan usaha yang berbasis pertanian dan dilaksanakan atas dasar keterpaduan dalam suatu sistem agribisnis, berorientasi pasar, memanfaatkan sumberdaya secara optimal, dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia berkualitas, menerapkan teknologi tepat guna, berwawasan lingkungan serta didukung oleh kelembagaan agribisnis yang kokoh.

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN AGRIBISNIS DALAM MODERNISASI DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Dengan mengacu pada pemikiran Jansen dalam Syahyuti, 2003, dalam melakukan pembaruan kelembagaan ada 3 langkah yang dapat dilakukan yakni :

- 1) identifikasi perubahan yang terjadi pada lingkungan,
- 2) pelajari modifikasi apa yang dilakukan kelembagaan sebagai respon terhadap perubahan tadi (meningkatkan kapasitas atau meningkatkan manajemen atau menciptakan metoda kerja baru),

- 3) evaluasi kualitas dan efektifitas sistem sebagai cara untuk memahami perubahan efek yang dimaksud.

Jika dihubungkan dengan pembangunan maka transformasi merupakan proses perubahan. Perubahan yang terjadi pada lingkungan dapat dilihat dari adanya globalisasi perdagangan menuntut bahwa sektor pertanian harus melakukan modifikasi dalam kelembagaan sebagai respon terhadap perubahan iklim perdagangan. Sesuai dengan paradigma baru pembangunan yakni pengembangan sistem dan usaha Agribisnis, maka modifikasi harus dilakukan terhadap kelembagaan Agribisnis.

Kondisi pertanian yang masih tradisional saat ini adalah akibat dari masyarakat yang masih tradisional yang ditandai :

- a) keadaan ketidakberubahan (*unchanging*),
- b) watak yang tidak berkembang, struktur sosial yang hirarkis,
- c) budaya keterikatan pada kebiasaan,
- d) sistem status yang telah ditentukan sebelumnya (askriptif) dengan jarak yang parah antara elit dengan massa,
- e) struktur kekuasaan yang digenggam oleh sekelompok kecil lapisan tertentu (oligarkis) dengan kemampuan yang rendah, dan f) ekonomi yang tidak produktif (Hagen dalam Nasution, 2002)

Kondisi tersebut membawa pada kondisi pertanian dan kelembagaan Agribisnis yang ada dengan masalah :

- 1) tingkat efisiensi usaha dan sistem yang masih rendah,
- 2) belum mampu bersaing (dalam kriteria 6 tepat),
- 3) sistem dan usaha Agribisnis belum terpadu baik vertical maupun horizontal,
- 4) produksi yang dihasilkan belum berorientasi pada pasar global,
- 5) pengelolaan usaha belum profesional,
- 6) SDM pelaku Agribisnis belum berkualitas (masih rendah)
- 7) teknologi yang digunakan belum berwawasan lingkungan, dan
- 8) kelembagaan Agribisnis yang ada belum kokoh (belum terjalin kerjasama antar lembaga).

Dalam mengembangkan kelembagaan, ada beberapa aspek yang perlu dilakukan, yaitu :

- 1) dibutuhkan iklim makro yang bersifat fasilitatif dan deregulatif,
- 2) menguatkan jaringan antar lembaga (internal dan eksternal),
- 3) membangun kelembagaan baru (dengan mengganti atau menambah), menggunakan dan memperkuat modal sosial (kepercayaan, norma yang dijalankan, jaringan sosial), dan
- 4) memperbaiki kelembagaan yang rusak dengan melakukan rekonstruksi sosial (menguatkan sesame, menghindari paksaan, memperbaiki hubungan horizontal dengan merubah struktur kelembagaan).

Transformasi (perubahan) tersebut hendaklah membahas perubahan pada budaya usaha pertanian dari usaha budaya pertanian tradisional/subsistem menjadi budaya usaha pertanian komersil/modern. Perubahan budaya ini akan tercermin dari :

- 1) perubahan karakteristik Sumber Daya Manusia (SDM),
- 2) perubahan karakteristik usahatani, dan
- 3) perubahan struktur jaringan kelembagaan.

Dalam rangka transformasi kelembagaan Agribisnis yang harus dimodernisasi meliputi: pengusaha, pekerja, perusahaan dan struktur Agribisnis. Dituntut perubahan karakteristik SDM, maka perlu adanya transformasi budaya material dan budaya non material yang akan mampu merubah pola pikir dan pola perilaku. Perubahan budaya material meliputi :

- 1) ilmu pengetahuan dan teknologi,
- 2) kapital, input fisik, dan
- 3) prasarana.

Sementara budaya non material yang perlu dirubah adalah :

- 1) kompetensi SDM,
- 2) manajemen/organisasi,
- 3) tata nilai kerja,
- 4) kepemimpinan,
- 5) sistem moral dan hukum,
- 6) dan sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam mengembangkan kelembagaan, ada beberapa aspek yang harus dilakukan, yaitu :

- 1) dibutuhkan iklim makro yang bersifat fasilitatif dan deregulatif,
- 2) menguatkan jaringan antar lembaga (internal dan eksternal),
- 3) membangun kelembagaan baru (dengan mengganti atau menambah),
- 4) menggunakan dan memperkuat modal-modal sosial (kepercayaan, norma yang dijalankan, jaringan sosial) dan
- 5) memperbaiki kelembagaan yang rusak dengan melakukan rekonstruksi sosial (meningkatkan kohetivitas, menghindari paksaan, memperbaiki hubungan horizontal dengan merubah struktur kelembagaan)

Dengan memadukan berbagai alternatif transformasi yang ada atau memilih salah satu dari alternatif transformasi kelembagaan, maka bentuk transformasi kelembagaan hendaklah disesuaikan dengan permasalahan dan kondisi yang ada, maka kedepan kelembagaan Agribisnis yang ada menunjukkan :

- 1) jaringan antar lembaga menjadi kuat,
- 2) terbentuk lembaga baru sesuai dengan subsistem pada sistem Agribisnis,
- 3) modal sosial menjadi kuat, dan
- 4) lembaga Agribisnis kedepan menjadi lebih baik.

Transformasi kelembagaan Agribisnis yang dilakukan akan merubah wajah usaha pertanian dari budaya usaha pertanian tradisional/subsisten menjadi budaya usaha pertanian komersil. Dampak yang akan dirasakan dari proses transformasi kelembagaan Agribisnis ini adalah :

- 1) Efisiensi sistem dan usaha agribisnis menjadi tinggi,
- 2) Usaha Agribisnis yang dikembangkan mampu bersaing (dengan kriteria 6 tepat),
- 3) usaha Agribisnis menjadi terpadu,
- 4) Usaha Agribisnis berorientasi pasar,
- 5) penggunaan sumber daya menjadi optimal,
- 6) pengelolaan sistem dan usaha Agribisnis menjadi professional,

- 7) Sumber daya manusia pengelola sistem dan usaha Agribisnis menjadi berkualitas,
- 8) teknologi yang digunakan berwawasan lingkungan dan
- 9) kelembagaan Agribisnis menjadi semakin kokoh. Ini semua akan membuat sistem dan usaha pertanian kita menjadi mampu bersaing pada perdagangan global.

pertanian modern yang akan berdampak: efisiensi usaha tinggi, mampu bersaing (6 tepat), orientasi usaha pada pasar, sistem usaha terpadu, pengelolaan profesional, penggunaan sumber daya optimal, sumber daya manusia berkualitas, teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan, dan manajemen Agribisnis yang kokoh.

SIMPULAN

Adanya perdagangan global menuntut adanya perubahan budaya usaha pertanian tradisional menjadi usaha pertanian modern/ komersil melalui proses modernisasi yaitu :

1. Modernisasi perlu dilakukan terhadap pengusahaan (petani dan pengusaha), pekerja, perusahaan usahatani dan Agribisnis melalui proses transformasi.
2. Transformasi yang harus dilakukan adalah transformasi budaya materil dan budaya non materil melalui kelembagaan Agribisnis, sehingga dapat merubah sistim sosial dan lingkungan dimana usaha pertanian itu dilakukan.
3. Proses transformasi akan dapat berjalan sesuai dengan harapan atau tidak sangat ditentukan oleh perubahan iklim makro (politik/kebijakan) yang bersifat fasilitatif dan regulatif.
4. Transformasi (pengembangan) kelembagaan Agribisnis tersebut dapat dilakukan seperti membentuk kelembagaan baru, memperbaiki kelembagaan yang rusak, membangun modal sosial, dan memperkuar jaringan antar lembaga.
5. Transformasi yang dilakukan pada kelembagaan Agribisnis akan membawa perubahan pada usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Bustanul, 2004. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Kompas. Jakarta
- Nasution Zulkarimen, 2002. Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Pranadji, Tri, 2003. Menuju Transformasi Kelembagaan Dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Badan Litbang Pertanian Bogor
- Rasahan, Chairil, A, dkk. 1999. Refleksi Pertanian. Tanaman Pangan dan Hortikultura Nusantara. Sinar Harapan. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1999. Sosiologi: Suatu Pengantar. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Syahyuti, 2003. Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor

Percikan : Vol. 86 Edisi Maret 2008

Sztompka, Piotr. 2004. Sosiologi
Perubahan Sosial. Prenada. Jakarta

Wiriaatmadja, S. 1983. Pokok-pokok
Sosiologi Pedesaan. Yasaguna.
Jakarta

